

**IMPLEMENTASI HUKUM
UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH
SAKIT TERHADAP LAYANAN INTENSIVE CARE UNIT
RUMAH SAKIT**

SKRIPSI



**Oleh:
Fajri Israq
150710064**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**IMPLEMENTASI HUKUM
UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH
SAKIT TERHADAP LAYANAN INTENSIVE CARE UNIT
RUMAH SAKIT**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



Oleh:

Fajri Israq

150710064

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau megister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 21 Februari 2020

Yang membuat perryataan,



Fajri Israq
NIM 150710064

**IMPLEMENTASI HUKUM
UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH
SAKIT TERHADAP LAYANAN INTENSIVE CARE UNIT
RUMAH SAKIT**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Oleh:

Fajri Israq

150710064

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 11 Maret 2020



**Irene Svinarky, S.H., M.Kn
Pembimbing**

Abstrak

Pelayanan kesehatan seperti rumah sakit berperan sebagai tempat rujukan dan fasilitas layanan kesehatan tingkan sekunder bahkan tersier. Permasalahan rawatan intensive di rumah sakit masih sering terjadi, apalagi di masa/ era jaminan kesehatan nasional. Ini tidak terlepas dari permasalahan hukum dan kebijakan publik yang sebelumnya sudah dipengaruhi oleh politik hukum. Adanya penolakan penerimaan pasien dengan rawatan icu (intensive care) di rumah sakit, disertai dengan upaya menghindari pengadaan sarana dan fasilitas dari rumah sakit untuk rawatan icu, muncul di beberapa rumah sakit. Ini akibat dari implementasi hukum yang dihasilkan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa bentrok hukum yang terjadi antara hukum atau perundangan undangan yang mendukung kebijakan publik terhadap masyarakat dengan hukum dan perundang undangan yang mengatur sistem layanan rumah sakit.. Beberapa Penyesuaian ini ada yang tidak representatif bagi dokter dan rumah sakit, hal ini mempengaruhi kualitas layanan icu. Selain itu tariff rumah sakit yang tidak seimbang dengan tarif inap bgs pada hampir setiap kasus icu. Disarankan perlunya kebijakan baru dan hukum baru yang mampu menghadapakan kedua sisi yang equal. Undang Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Undang Undang tentang Rumah sakit, sejatinya dapat memberikan pelayanan paripurna bagi masyarakat banyak.

Kata kunci: Perawatan Intensive, politik hukum, Undang Undang Rumah Sakit.

Abstract

In Health services such as hospitals play a role as a place of reference and secondary and tertiary health care facilities. The problem of intensive care in hospitals is still common, especially in the era / era of national health insurance. This is inseparable from legal issues and public policies that have previously been influenced by legal politics. The refusal of accepting patients with ICU treatment (intensive care) in hospitals, accompanied by efforts to avoid procuring facilities and facilities from hospitals for ICU treatment, appeared in several hospitals. This is a result of the implementation of the resulting law. Some of these adjustments are not representative for doctors and hospitals, this affects the quality of ICU services. In addition, hospital tariffs are not balanced with inpatient rates in almost every ICU case. Suggested the need for new policies and new laws that are able to deal with both sides are equal. The Law on Social Security Organizing Bodies and the Law on Hospitals, can actually provide plenary services for the public at large.

Keyword: Hospital Law, intensive Care, legal politics.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi starta satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulias menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasapenulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

- 1 Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam
- 2 Ibu Riski Tri Anugrah Bhakti, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
- 3 Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
- 4 Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
- 5 Ibu Riski Tri Anugrah Bhakti, SH., MH., selaku Pembimbing Akademis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
- 6 Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam.

- 7 Teristimewa buat istri dan anak tercinta, serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan, dukungan, kasih sayang dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 8 Untuk keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan dorongan, dukungan, kasih sayang dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 9 Untuk seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu ada dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
- 10 Dan semua pihak yang selalu mendukung saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Aamiin.

Batam, 11 Maret 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal loop and a small flourish at the bottom right.

Fajri Israq

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Pembatasan Masalah	3
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Kerangka Teori.....	20
2.1.1 Pengertian Hukum Kesehatan	21
2.1.2 Pengertian dan pengaturan pelayanan kesehatan	21
2.1.3 Asas-asas pelayanan kesehatan	21
2.1.4 Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Kebijakannya	26
2.1.5 Kelembagaan.....	27
2.1.6 Peraturan Pelaksanaan	27
2.1.7 Manfaat dan Pemberian Manfaat	38
2.1.8 Kebijakan	30
2.2. Kerangka Yuridis	47
2.2.1. Rumah Sakit dan Landasan Hukum.	47
2.2.2. Fasilitas Rawatan Intensive Care Unit.....	50
2.2.3. Implementasi Hukum dan Kebijakan	53
2.2.4. Kajian Perundang-Undangan	55
2.2.5. Bagan Implementasi	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	62
3.1 Rancangan Penelitian	62
3.2 Metode Penelitian.....	63
3.3 Sumber Data Penelitian	63
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	64
3.5 Alat Pengumpulan Data.....	64
3.6 Validasi Data.....	65
3.7 Pengolahan dan Analisa Data	66
3.8 Pengumpulan Data	68

3.9	Analisi Data.....	68
3.10	Penyajian Data	69
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1	Hasil Penelitian	72
4.1.1	Hal – hal penting terkait dengan pelayanan kesehatan menurut undang – undang kesehatan	72
4.1.2	Fasilitas, Pedoman Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	75
4.1.3	Pembiayaan dan Komponen Jasa Medis Menurut Undang – Undang Kesehatan	
4.2	Pembahasan.....	77
4.2.1	Kebijakan atau Regulasi BPJS Kesehatan	81
4.2.2	Aspek Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan BPJS dan Layanan Rumah Sakit.....	82
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	153
5.1.	Kesimpulan	153
5.2.	Saran	154
DAFTAR PUSTAKA.....		161
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		